

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagus & Afif, 2021. Fenomena Pengisian Jabatan Pegawai Negeri Sipil Oleh TNI/POLRI, *SOSIO YUSTISIA Volume 1, Nomor 1*.
- Chairil, T., 2020. TNI–Polri Aktif Rangkap Jabatan: Problematik, *CBDS Commentaries* (1) 2020.
- Dalianti, L., 2019. *Pengisian jabatan pimpinan tinggi oleh perwira Tentara Nasional Indonesia/anggota kepolisian Republik Indonesia*, Universitas Indonesia.
- Departemen Agama RI, 1986. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:Intermassa.
- Fahrani, N., 2018. Analisis Hukum: Kriteria Dan Syarat Jabatan ASN Tertentu Yang Dapat Diisi Dari Anggota POLRI Dan Prajurit TNI, *Civil Service* Vol. 12, No.2.
- Goesniadhie S, 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum*, Surabaya: Nasa Media.
- <http://bbppksmakassar.kemsos.go.id>.
- <https://peraturan.go.id/files/uu-no-20-tahun-2023.pdf>
- Kurniawan, dkk, 2007. *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Lon L. Fuller, 1964. *The Morality of Law*, McGraw-Hill: Yale University Press.
- Manan, B., 2001. *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Marbun, 2003. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan*, Bandung. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Marzuki, P., 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, P., 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, A., 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I, Bandung : PT. Citra AdityaBakti.
- Nabilah, I., 2023. Impelementasi Anggota. TNI-POLRI menjadi Pelaksana Tugas Kepala Daerah, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* (3) 2.
- Nugroho, S., 2009. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro

### Hukum dan Humas.

- Pasal 1 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 28.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037.
- Rahardjo, S., 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ranawijaya, U., 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*, Jakarta Ghalia Indonesia.
- Ridwan & Nurmalita A., 2018. Harahap, *Hukum Kepegawaian*, UII Press, Yogyakarta.
- Schluter, W., 2010. *Soft Corruption: How Unethical Conduct Undermines Good Government and What to Do About It*, Rutgers University Press.
- Sedarmayanti & Hidayat, S., 2002. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Septiani, A., 2022. *Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Tanfidziyah*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Soekanto & Mahmudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soeprapto, M., 2006. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Suarna, A., 2022. *Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Dari Unsur*

*TNI/POLRI Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Suhartono, 2011. *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*, Desertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sulistiyawan, 2019. Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2019, hal. 2
- Sunggono, B., 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surayin, 2001. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya.
- Tutik, T., 2017. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*, (Depok: Prenadamedia Group.
- Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal 7
- Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal 5.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara *PDF*.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara *PDF*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia *Pdf*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia *Pdf*.
- Wahyudi, A., 2020. *Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di BUMN*, Universitas Slam Negeri Alauddin Makassar.

Warsana, 2012. *Tumpang Tindih: Sebuah Komposisi Musik alam Interpretasi, Resital* (13) 1.

Zainal, A., 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Zulfahmi, 2020. Tinjauan Yuridis Penunjukan Anggota TNI POLRI Aktif Sebagai Pelaksana Tugas, Pengganti Jabatan Kepala Daerah di Indonesia, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume X Edisi 1.